

2023



**PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

RENCANA KERJA TAHUN 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

Jl. Sindoro No. 7, Kajen

BAB I PENDAHULUAN

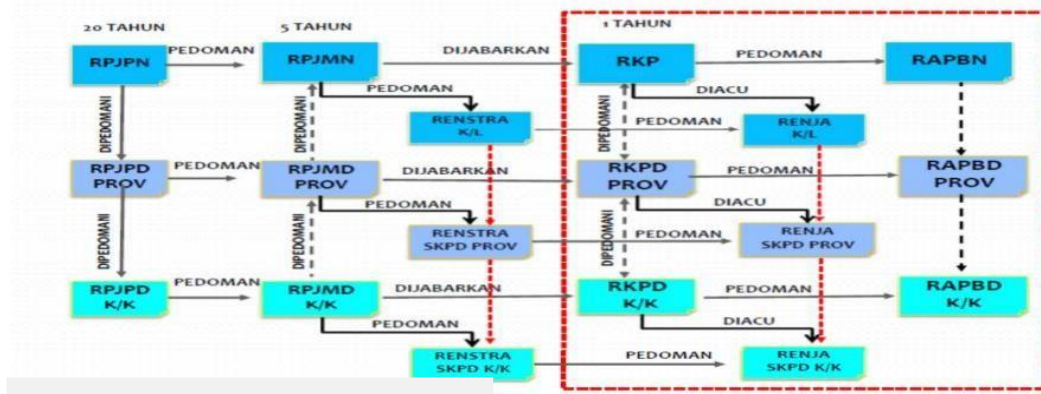
A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023. Hal ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1
Kedudukan Renja BPKD Kabupaten Pekalongan dengan
Dokumen Perencanaan lainnya.

Selanjutnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

2. Tujuan :

- a. Sebagai pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sebagai kendali dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- b. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
- c. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- d. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana kerja dan pendanaan yang mana matrik diprint out dari SIPD.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun lalu dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun lalu dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 dapat dilihat dari capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja yakni merupakan akumulasi dari capaian keuangan dan fisik. Adapun capaian evaluasi rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Capaian keuangan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 adalah sebesar 97,45%.

2. Capaian kinerja, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran/output yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan yakni sebesar 100%.

Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 435.827.715.730 Dan terealisasi sebesar Rp 424.719.231.577 (97,45%). Anggaran tersebut untuk membiayai 4 (empat) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan. Adapun capaian keuangan program/kegiatan/sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	output (Indikator Kinerja)	Target Output	Realisasi Output	% realisasi output	Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp.)	% Anggaran
Penunjang Urusan Pemerintahan							
Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan							
Program Pengelolaan Keuangan Daerah					388.971.180.139	385.072.419.318	99,00
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					2.183.291.000	1.804.547.300	82,65
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2 dok	2 dok	100%	187.987.000	148.586.500	79,04
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS perubahan yang tersusun	2 dok	2 dok	100%	146.280.000	128.429.000	87,80
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	2 dok	2 dok	100%	707.571.500	664.435.100	93,90
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	Jumlah dokumen Perda Perubahan APBD dan Perbup Perubahan Penjabaran APBD yang disusun	2 dok	2 dok	100%	722.536.900	641.207.450	88,74
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen peraturan pendukung pengelolaan keuangan daerah dan Pelaksanaan	6 dok	6 dok	100%	418.915.600	221.889.250	52,97
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					688.421.500	560.829.650	81,47
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD yang diterbitkan	2 dok anggaran kas dan 350 SPD	2 dok anggaran kas dan 350 SPD	100%	145.136.500	98.418.750	67,81
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Harian Posisi Kas Daerah dan Pelaporan Pencapaian Penggunaan Dana Transfer lebih tepat waktu	2 dok	2 dok	100%	105.000.000	88.765.900	84,54
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah daftar gaji ASN dan terlaksananya rekonsiliasi PFK	4 lap PFK & 2 BA Rekonsiliasi Pajak	4 lap PFK & 2 BA Rekonsiliasi Pajak	100%	173.904.000	155.482.000	89,41

Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah belanja APBD Kabupaten Pekalongan	1000 blangko	1000 blangko	100%	264.381.000	218.163.000	82,52
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah				1.695.234.000	1.603.915.100	94,61
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam 1 Tahun Anggaran dan jumlah laporan prognosis enam bulan berikutnya.	4 dok	4 dok	100%	251.183.000	242.654.900	96,60
Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dok	1 dok	100%	467.023.000	446.156.900	95,53
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dalam 1 tahun anggaran	1 dok	1 dok	100%	712.330.000	671.871.000	94,32
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah kasus TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) yang tertangani	2 kasus	2 kasus	100%	51.019.000	50.752.000	99,48
Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Keuangan OPD dan Jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah	45 OPD	45 OPD	100%	213.679.000	192.480.300	90,08
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					384.069.633.639	380.770.878.968	99,14
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tersalurkan	272 desa	272 desa	100%	368.012.026.125	367.406.839.656	99,84
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana untuk keperluan mendesak dan tidak bisa di prediksi	1 tahun	1 tahun	100%	5.604.000.000	4.684.640.612	83,59
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah tahun Bagi Hasil Pajak dan Restribusi kepada Desa	272 desa	272 desa	100%	10.453.607.514	8.679.398.700	83,03
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					334.600.000	332.248.300	99,30
Sub Kegiatan Implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Waktu terpeliharanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	334.600.000	332.248.300	99,30
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan				3.827.822.000	2.473.576.392	64,62
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik				3.827.822.000	2.473.576.392	64,62
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya pemeliharaan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	1 dok	1 dok	100%	372.868.000	338.157.950	90,69
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dok	1 dok	100%	59.000.000	54.756.500	92,81

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	1 dok	100%	452.377.000	418.956.700	92,61
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Pensertifikatan tanah dan pemasangan papan nama identitas kepemilikannya, penjualan barang milik daerah	3 paket kegiatan	3 paket kegiatan	100%	1.972.832.000	734.871.342	37,25
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah guna pemanfaatan,	3 dok	3 dok	100%	161.216.000	154.269.200	95,69
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	1 dok	1 dok	100%	351.201.000	337.952.800	96,23
Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	47 OPD	47 OPD	100%	458.328.000	434.611.900	94,83
Program Pengelolaan Pendapatan Daeraah	Persentase capaian PAD terhadap target				2.964.308.400	2.775.607.744	93,63
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daeraa					2.964.308.400	2.775.607.744	93,63
Sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Perda dan Perkada tentang Pajak Daerah	2 dok	2 dok	100%	162.422.200	109.254.600	67,27
Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Daerah	Jumlah desa yang menerima penyampaian SPPT dan PBB dan Peningkatan Pengetahuan Petugas Pemungut di desa/kelurahan	285 desa	285 desa	100%	224.105.500	218.149.500	97,34
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT, DHKP, dan pendukungnya	126 box blangko SPPT, 60 box blangko DHKP dan tenaga outsorsing	126 box blangko SPPT, 60 box blangko DHKP dan tenaga outsorsing	100%	544.847.800	511.713.210	93,92
Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pemutakhiran Database 22000 OP, penilaian 100 OP 75 bh	Pemutakhiran Database 22000 OP, penilaian 100 OP 75 bh	100%	246.634.900	222.226.100	90,10
Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi basis data pajak daerah, yang terpelihara	3 aplikasi	3 aplikasi	100%	266.012.400	261.987.650	98,49
Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah bulan tertagihnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	12 bulan	12 bulan	100%	471.977.600	427.861.184	90,65
Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan Rekonsiliasi penerimaan	12 bulan	12 bulan	100%	1.048.308.000	1.024.415.500	97,72

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.064.405.191	34.397.628.123	85,86
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.013.000	16.301.850	85,74
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 dok	2 dok	100%		19.013.000	16.301.850	85,74
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.017.720.541	10.816.006.112	83,09
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN BPKD Kab. Pakel	12 bulan	12 bulan	100%		12.705.832.541	10.517.823.812	82,78
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan terbayarnya honor	12 bulan	12 bulan	100%		311.888.000	298.182.300	95,61
Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.247.492.150	1.982.231.573	88,20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Terpenuhinya Komponen Instalasi	12 bulan	12 bulan	100%		13.607.750	12.403.700	91,15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan	5 jenis	5 jenis	100%		1.813.050.000	1.615.524.830	89,11
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan terpenuhinya Peralatan	12 bulan	12 bulan	100%		46.052.000	42.103.000	91,42
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Terpenuhinya Alat Tulis	12 bulan	12 bulan	100%		105.387.400	104.303.150	98,98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya barang	12 bulan	12 bulan	100%		80.040.000	73.264.450	91,53
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan tersedianya Makan dan minum	12 bulan	12 bulan	100%		64.355.000	45.490.600	70,69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka rapat-rapat	12 bulan	12 bulan	100%		125.000.000	89.141.843	71,31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.281.120.000	20.722.072.970	93,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi	12 bulan	12 bulan	100%		22.002.000.000	20.448.255.386	92,94
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya Jasa Kebersihan	12 bulan	12 bulan	100%		279.120.000	273.817.584	98,10
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						854.422.500	835.973.468	97,84

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan	12 bulan	12 bulan	100%	228.894.000	216.764.746	94,70
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan	12 bulan	12 bulan	100%	290.432.000	285.458.000	98,29
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan erseediaan ya	12 bulan	12 bulan	100%	335.096.500	333.750.722	99,60

Adapun Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) 2021 dan Pencapaian Renstra Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
02													
	Penunjang Urusan pemerintahan												
02	2												
	Bidang Urusan Keuangan												
02	2	01											
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah												
02	2	01	00	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
02	2	01	01	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	10	2	2	2	100	2	6	60
02	2	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan yang tersusun	10	2	2	2	100	2	6	60
02	2	01	07	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Tersusunnya dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	10	2	2	2	100	2	6	60
02	2	01	08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	Tersusunnya dokumen Perda Perubahan APBD dan Perbup Perubahan Penjabaran APBD yang disusun	10	2	2	2	100	2	6	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
02	2	01	11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersusunnya dokumen peraturan pendukung pengelolaan keuangan daerah dan Pelaksanaan APBD Tahun 2021	30	6	6	6	100	6	18	60
02	2	02	00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang terlaksana								
02	2	02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD yang diterbitkan	10	2	2	2	100	2	6	60
02	2	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersedianya Laporan Harian Posisi Kas Daerah dan Pelaporan Pencapaian Penggunaan Dana Transfer lebih tepat waktu	10	2	2	2	100	2	6	60
02	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersusunnya daftar gaji ASN dan terlaksananya rekonsiliasi PFK	20	4	4	4	100	4	12	60
02	2	02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terbayarnya belanja APBD Kabupaten Pekalongan	5000	1000	1000	1000	100	1000	3000	60
02	2	03	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah								

02	2	03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam 1 Tahun Anggaran dan jumlah laporan prognosis enam bulan	20	4	4	4	100	4	12	60
02	2	03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100	1	3	60
02	2	03	05	Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dalam 1 tahun anggaran	5	1	1	1	100	1	3	60
02	2	03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tertanganinya kasus TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi)	10	2	2	2	100	2	6	60
02	2	03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Keuangan OPD dan Jumlah OPD yang melaksanakan	225	45	45	45	100	45	135	60
02	2	04	00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
02	2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	1360	272	272	272	100	272	816	60
02	2	04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana untuk keperluan mendesak dan tidak bisa di prediksi	5	1	1	1	100	1	3	60
02	2	04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terbayarkannya Badi Hasil Pajak dan Restribusi kepada Desa	1360	272	272	272	100	272	816	60
02	2	05	00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah									
02	2	05	02	Implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Waktu terpeliharanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam 1 tahun	60	12	12	12	100	12	36	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
03	2											
03	2	01	00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan							
03	2	01	00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik							
03	2	01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya pemeliharaan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	5	1	1	100	1	3	60
03	2	01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	1	1	100	1	3	60
03	2	01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	1	1	100	1	3	60
03	2	01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pensertifikatan tanah dan pemasangan papan nama identitas kepemilikannya, penjualan barang milik daerah	15	3	3	100	3	9	60
03	2	01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah guna pemanfaatan, pemindahtanganan dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah	15	3	3	100	3	9	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03	2	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengawasan dan Pengendalian Barang	5	1	1	1	100	1	3	60
03	2	01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan tentang Pengelolaan Barang Milik	235	47	47	47	100	47	141	60
04	2			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
04	2	01	00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
04	2	01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Perda dan Perkada tentang Pajak Daerah	10	2	2	2	100	2	6	60
04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyampaian SPPT dan PBB dan Peningkatan Pengetahuan Petugas Pemungut di 285 desa/kelurahan.	1425	285	285	285	100	285	855	60
04	2	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya SPPT, DHKP, dan pendukungnya	558	186	186	186	100	186	558	60
04	2	01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	110000	22000	22000	22000	100	22000	66000	60
04	2	01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terpeliharanya basis data pajak daerah, terpeliharanya sistem aplikasi pelayanan PBB dan BPHTB online serta pengadaan sistem peta PBB berbasis WEB	15	3	3	3	100	3	9	60
04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	Terlagihnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	60	12	12	12	100	12	36	60
04	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah	60	12	12	12	100	12	36	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	2									
01	2	01								
01	2	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pada BPKD Kab.					
01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	10	2	2	2	100
01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)					
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dan Insentif pemungut pajak daerah	60	12	12	12	100
01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan tersedianya Jasa administrasi keuangan	60	12	12	12	100
01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Asuransi Barang Milik daerah	60	12	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (%)								
01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)	20	4	4	4	100	4	12	60
01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)								
01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	60	12	12	12	100	12	36	60
01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	12	12	12	100	12	36	60
01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	60	12	12	12	100	12	36	60
01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Alat Tulis	60	12	12	12	100	12	36	60
01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak	60	12	12	12	100	12	36	60
01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	60	12	12	12	100	12	36	60

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100	12	36	60
01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	60	12	12	12	100	12	36	60
01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)	60	12	12	12	100	12	36	60
01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara								
01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	60	12	12	12	100	12	36	60
01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	60	12	12	12	100	12	36	60
01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30	6	6	6	100	6	18	60

B. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai beberapa indikator kinerja pelayanan yang dipergunakan untuk menilai kinerja, yaitu :

1. Opini BPK.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, target renstra setiap tahunnya adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan sudah dapat tercapai dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Tahun 2019, Wajar Tanpa Pengecualian;
- b. Tahun 2020, Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. Tahun 2021, Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Rasio PAD terhadap APBD.

Target PAD Tahun 2019 s.d. 2022 ditetapkan sebesar 14,85 % di tahun 2019, 15,29 % di tahun 2020, 15,62 % di tahun 2021, dan 20,59 % di tahun 2022.

Pada tahun 2019 PAD memberikan kontribusi sebesar 15,85%, tahun 2020 sebesar 16,24%, dan tahun 2021 sebesar 16,68 % dari target renstra. Artinya peranan atau kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dari tahun 2019 s.d. 2021 bisa melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Persentase Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Bahwa penyusunan Raperda APBD Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan tahapan dan proses penyusunan APBD berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD setiap tahunnya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Penetapan Perda APBD yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa penetapan Raperda APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Perda APBD Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018.
- b. Perda APBD Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2019.
- c. Perda APBD Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2020.

Sedangkan untuk Pelaporan Keuangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari tahun 2019 s.d. 2021 telah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 telah disampaikan pada tanggal 20 Maret 2020.
- b. Laporan Keuangan Daerah Tahun 2020 telah disampaikan pada tanggal 18 Maret 2021.
- c. Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021 telah disampaikan pada tanggal 17 Maret 2022.

4. Pertumbuhan PAD.

Target pertumbuhan PAD dari tahun 2019 s.d. 2022 ditetapkan sebesar 5 % setiap tahunnya.

Pada tahun 2019 pertumbuhan PAD sebesar 9,66 % dimana realisasi PAD pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 341.344.415.575,00 dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp 311.288.143.681,83.

Pada tahun 2020 pertumbuhan PAD sebesar 0,13 % dari tahun 2019, dimana pada tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp 341.344.415.575,00 meningkat menjadi Rp 341.786.559.234,00 di tahun 2020.

Dan pada tahun 2021 pertumbuhan PAD sebesar 1,37% dari tahun 2020 dimana realisasi PAD pada tahun 2020 sebesar Rp 341.901.469.549,15 meningkat menjadi Rp 346.599.468.113,44 di tahun 2021.

Adapun secara rinci analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dapat dijelaskan dalam table 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keuangan									
1	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio PAD terhadap Total penerimaan APBD				15,29	15,62	20,59	15,69	16,24	16,68
3	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah			100	100	100	100	100	100	100
4	Pertumbuhan PAD			5	5	5	5	9,66	0,13	1,37

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan - permasalahan yang dihadapi dan perlu adanya pemecahan masalah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan antara lain :

1. Masih kurangnya SDM di berbagai Bidang antara lain tenaga pemungut dan tenaga ahli penaksir pajak dan retribusi daerah, tenaga administrasi maupun operator komputer;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk proses pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
3. Tidak validnya data Obyek dan Subyek Pajak serta Data Piutang yang diserahkan ke daerah pada saat pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah;
4. Masih Kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak / retribusi daerah;
5. Adanya perkembangan regulasi terkait pemberian gaji pada PNS diantaranya perubahan pola perhitungan dan penyetoran iuran BP TAPERAs sehingga perlu pembaruan / updating terhadap SIM Gaji;

Melihat dari permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja BPKD di masa yang akan datang, **peluang** untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

1. Perlunya penambahan Pegawai untuk Petugas Pemungut Pajak Daerah / Retribusi Daerah, petugas appraisal / penaksir PBB-P2, tenaga administrasi maupun operator komputer dan peningkatan SDM melalui Bimbingan Teknik;
2. Perlunya dilaksanakan kegiatan pemutakhiran Data Obyek Pajak dan Wajib Pajak PBB;
3. Dilakukan pemeliharaan pendataan/up date data, sehingga diharapkan data mendekati valid yang berdampak pada hasil perencanaan pendapatan;
4. Perlu perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi serta peraturanpendukung lainnya dalam pengelolaan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi sehingga sesuai dengan kondisi riil yang ada;
5. Melaksanakan Kegiatan Updating SIM Gaji, untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terkait pemberian gaji pada PNS;
6. Perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah untuk menggantikan Perda yang lama agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping adanya peluang yang dapat dimanfaatkan terdapat berbagai **tantangan** yang perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan, tantangan tersebut antara lain :

1. Kebijakan nasional / peraturan perundang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi penyusunan kebijakan pembangunan di daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah;
3. Belum optimalnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah terhadap penyusunan kebijakan;
4. Belum optimalnya hasil penyusunan kebijakan karena masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
5. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan amanat peraturan perundangan dengan melaksanakan pentahapan APBD dengan melibatkan secara langsung masyarakat terutama melalui forum Musrenbang. OPD pun telah melakukan upaya aktif dengan berusaha menampung berbagai usulan dari setiap wilayah dan mensinkronkan dengan program-program yang telah digariskan dalam RPJMD dan Renstra OPD. Melihat tingkat keaktifan masyarakat tersebut, OPD juga berusaha melakukan pendampingan tidak hanya dari segi finansial namun juga dukungan melalui pembinaan secara sistematis dan terpadu dengan stake holder terkait. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	37,305,300,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	37,305,300,000	
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	20,000,000	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	20,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	2 Dokumen	10.000.000	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	2 Dokumen	10.000.000	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000	

	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12,300,000,000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12,300,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81 Orang	12,000,000,000	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81 Orang	12,000,000,000	
	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	300,000,000	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	300,000,000	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	10,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	10,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	1 Dokumen	5,000,000	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	1 Dokumen	5,000,000	
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	5,000,000	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	5,000,000	

4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	460,000,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	460,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	10,000,000	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	10,000,000	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah paket terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	100,000,000	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah paket terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	100,000,000	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	50,000,000	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	50,000,000	
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang disediakan	1 Paket	100,000,000	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang disediakan	1 Paket	100,000,000	
	5. Fasilitas Kunjungan Tamu	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	45.000.000	5. Fasilitas Kunjungan Tamu	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	45.000.000	
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	145.000.000	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	145.000.000	
	7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada	1 Dokumen	10.000.000	7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada	1 Dokumen	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan	100 %	2,710,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan	100 %	2,710,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	
	2 Pengadaan Mebel	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Paket	50,000,000	2 Pengadaan Mebel	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Paket	50,000,000	
	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000.000	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000.000	
	4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000	4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000	
	5. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	5. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	

6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21,140,300,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21,140,300,000
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :				
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	20,840,300,000	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	20,840,300,000
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	300,000,000	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	300,000,000
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara	100%	665,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara	100%	665,000,000
	Sub					Sub				
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	55 Unit	295,000,000	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	55 Unit	295,000,000
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	250,000,000	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	250,000,000
	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	120,000,000	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	120,000,000

B.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100%	388,829,800,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100%	388,829,800,000	
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	100%	2,237,000,000	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	100%	2,237,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	250,000,000	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	250,000,000	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	200,000,000	2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	200,000,000	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	737,000,000	3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	737,000,000	
	4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	2 Dokumen	850,000,000	4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	2 Dokumen	850,000,000	

	5. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6 Dokumen	200,000,000	5. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6 Dokumen	200,000,000	
2.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang terlaksana	100%	718,000,000	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang terlaksana	100%	718,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	1. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	100.000.000	1. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	100.000.000	
	2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya2.	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya2.	2 Dokumen	125,000,000	2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya2.	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya2.	2 Dokumen	125,000,000	

3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	188,000,000	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	188,000,000
4.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan	2 Dokumen	60,000,000	4.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan	2 Dokumen	60,000,000

	5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2000 Dokumen	200,000,000	5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2000 Dokumen	200,000,000	
3.		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	100%	1,290,000,000		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	100%	1,290,000,000	
		Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
	1.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	200,000,000	1.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	200,000,000	
	2.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	250,000,000	2.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	250,000,000	
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	500,000,000	3.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	500,000,000	

	4. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	100,000,000	4. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	100,000,000	
	5. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah OPD yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45 OPD	240,000,000	5. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah OPD yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45 OPD	240,000,000	
4.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Prosentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	100%	384,249,800,000	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Prosentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	384,249,800,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah desa yang menerima dana desa dan Alokasi Dana Desa	272 Desa	367,449,800,000	1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah desa yang menerima dana desa dan Alokasi Dana Desa	272 Desa	367,449,800,000	
	2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah tahun tersalurkannya dana untuk keperluan mendesak dan tidak diprediksi	1 Tahun	6,000,000,000	2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah tahun tersalurkannya dana untuk keperluan mendesak dan tidak diprediksi	1 Tahun	6,000,000,000	
	3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak dan retribusi	272 Desa	10,800,000,000	3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak dan retribusi	272 Desa	10,800,000,000	
5.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Terwujudnya Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Keuangan	100%	335,000,000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Terwujudnya Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Keuangan	100%	335,000,000	

	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang Terpelihara	2 Aplikasi	335,000,000	1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang Terpelihara	2 Aplikasi	335,000,000	
C.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab	100%	3,850,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab	100%	3,850,000,000	
1.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	100%	3,850,000,000	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	100%	3,850,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	1. Penyusunan Standar Harga	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen Perbup standar satuan harga yang tersusun	1 Dokumen	250,000,000	1. Penyusunan Standar Harga	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen Perbup standar satuan harga yang tersusun	1 Dokumen	250,000,000	
	2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	250,000,000	2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	250,000,000	
	3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100,000,000	3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100,000,000	
	4. Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	175,000,000	4. Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	175,000,000	
	5. Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	225,000,000	5. Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	225,000,000	

	6. Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Dokumen Asuransi Gedung Kantor, Gedung Pasar, Kendaraan Dinas Gedung Bangunan Terpelihara Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah Terpasang Sertifikat Tanah	3 Dokumen 4 Unit 0 Laporan 100 Buah 200 Sertifika	2,200,000,000	6. Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Dokumen Asuransi Gedung Kantor, Gedung Pasar, Kendaraan Dinas Gedung Bangunan Terpelihara Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah Terpasang Sertifikat Tanah	3 Dokumen 4 Unit 0 Laporan 100 Buah 200 Sertifika	2,200,000,000	
	7. Penilaian Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	100,000,000	7. Penilaian Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	100,000,000	
	8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	200,000,000	8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	200,000,000	
	8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	200,000,000	8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	200,000,000	
	9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45 Laporan	40,000,000	9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45 Laporan	40,000,000	

	10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	1 Laporan	60,000,000	10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	1 Laporan	60,000,000	
	11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah OPD yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47 OPD	50,000,000	11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah OPD yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47 OPD	50,000,000	
D.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKD Kabupaten Pekalongan	Pertumbuhan PAD	100%	3,273,098,858	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKD Kabupaten Pekalongan	Pertumbuhan PAD	100%	3,273,098,858	
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Peningkatan PAD tiap tahunnya	100%	3,273,098,858	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Peningkatan PAD tiap tahunnya	100%	3,273,098,858	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	91,000,000	1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	91,000,000	
	2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	285 Desa	200.000.000	2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	285 Desa	200.000.000	
	3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan terpenuhinya tenaga administrasi dan penunjang pelayanan PBB	12 Bulan	550,021,500	3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan terpenuhinya tenaga administrasi dan penunjang pelayanan PBB	12 Bulan	550,021,500	

	4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kartu Obyek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	22.175 Objek Pajak	632,076,958	4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kartu Obyek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	22.175 Objek Pajak	632,076,958	
	5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah aplikasi database pajak daerah terupdate Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Aplikasi	400,000,400	5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah aplikasi database pajak daerah terupdate Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Aplikasi	400,000,400	
	6. Penagihan Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	400,000,000	6. Penagihan Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	400,000,000	
	7. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan Koordinasi dan Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah yang terlaksana	12 Bulan	1,000,000,000	7. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan Koordinasi dan Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah yang terlaksana	12 Bulan	1,000,000,000	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pada forum OPD ada beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tab
el
2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku
Kepentingan
Tahun
2023

No.	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026. Target tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diupayakan akan tercapai melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan, serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan maka penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 harus selaras dan sinergis dengan RPJMD Kabupaten Pekalongan Periode Tahun 2021-2026.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 4 (empat) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, dan (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan pendekatan perencanaan dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;

(2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pekalongan sebagaimana RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, (2) Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, dan (3) Prioritas program-program Pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional

1. Visi

Visi pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”

Rumusan visi tersebut merupakan kumpulan dari beberapa frase yang perlu dijabarkan kembali sehingga dapat diketahui maknanya. Penjabaran frase ini berguna untuk memberikan batasan mengenai kondisi yang ingin dicapai oleh visi tersebut. Penjabaran dari masing-masing frase visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan sejahtera yang dimaksud dalam frase visi ini adalah:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan.
- 2) Memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai.
- 3) Terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya.
- 4) Penyerapan tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.
- 5) Mampu bersaing dan berinovasi dalam dunia perekonomian dengan berbasis penguatan ekonomi kerakyatan yang mandiri.

b. Adil

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kondisi yang sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Penjelasan frase “ADIL” dalam visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah:

- 1) Menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pekalongan.
- 2) Menghilangkan ego structural.
- 3) Menghilangkan diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat kabupaten Pekalongan.
- 4) Pelaksanaan segala regulasi dan perundang – undangan yang berkeadilan.

c. Merata

Merata berasal dari kata dasar rata, yang memiliki arti mencakup semua bagian; tersebar ke segenap penjuru; sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sehingga merata dapat diartikan sebagai menjadi rata atau tersebar ke segala penjuru. Frase merata dalam visi pembangunan Kabupaten Pekalongan ini adalah:

- 1) Pendistribusian kegiatan pembangunan secara merata disemua wilayah dan sektor atau bagian;
- 2) Terpenuhinya infrastruktur publik yang memadai;
- 3) Terbukanya konektivitas antar wilayah.

d. Bergotong Royong

Bergotong royong artinya adalah dengan bekerja bersama-sama, yaitu kondisi dimana dalam pelaksanaan pembangunan, semua komponen harus bergerak bersama untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Bergotong royong juga dapat diartikan sebagai sebuah sikap persaudaraan dan toleransi. Adapun frase bergotong royong dalam visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah:

- 1) Bahu membahu dalam menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan;
- 2) Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas;
- 3) Menumbuhkan sikap tolong menolong;
- 4) Mempererat tali silaturahmi dan atau persaudaraan;

- 5) Meningkatkan rasa solidaritas;
- 6) Memperkokoh persatuan.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

- (1) Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong
- (2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi
- (3) Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.
- (4) Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya local
- (5) Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dari misi 1, adalah menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman dan nyaman. Dengan rumusan sasaran :
 - 1) Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat
 - 2) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah
- b. Tujuan dari misi 2 adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Sasaran yang ingin dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
 - 2) Menguatnya kinerja pengawasan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan

- 3) Meningkatnya pengelolaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam menjalankan pemerintahan daerah
 - 4) Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Tujuan dari misi 3 adalah meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasarannya meliputi:
- 1) Meningkatnya kontribusi dari sektor-sektor potensial pendukung perekonomian daerah
 - 2) Meningkatnya daya tarik investasi
 - 3) Menurunnya angka pengangguran, PPKS dan meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat
 - 4) Menguatnya peran desa dalam mengembangkan potensi masyarakat
- d. Tujuan dari misi 4 adalah:
- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudi luhur; dengan sasaran
 - a) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat;
 - b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
 - c) Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan Hak Anak.
 - 2) Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan sasaran : Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan.
- e. Tujuan dari misi 5 adalah Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap bencana. Sasaran yang ingin dicapai:
- 1) Meningkatnya pembangunan infrastruktur, pemanfaatan ruang, dan keterhubungan antar wilayah
 - 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
 - 3) Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang ada.

Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya

dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan, oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Penyusunan strategi pembangunan Kabupaten Pekalongan selain berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi dan disusun berdasarkan atas misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026. Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Strategi Pembangunan Misi 1 Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong.

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman dan nyaman. Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- a) Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan penuh toleransi melalui penguatan FKUB, penguatan rasa nasionalisme, dan peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik, serta mengembangkan sikap dan budaya gotong royong dalam bermasyarakat.

- b) Sasaran 2 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan budaya tertib dan patuh hukum melalui pemasyarakatan produk hukum daerah, pelaksanaan patroli berkala, serta peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam penegakan peraturan hukum daerah.

- 2) Strategi Pembangunan Misi 2 Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- a) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas pembangunan melalui perencanaan program yang berorientasi pada hasil, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta pelaporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b) Sasaran 2 : Menguatnya kinerja pengawasan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu menguatkan kualitas pengawasan melalui peningkatan kompetensi APIP dan pemanfaatan partisipasi masyarakat.

- c) Sasaran 3 : Meningkatnya pengelolaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan profesionalisme ASN dan pembentukan lembaga yang efektif.
- d) Sasaran 4 : Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan inovasi, pemanfaatan data dan arsip yang terkelola, serta meningkatkan kualitas complain handling sistem.
- 3) Strategi Pembangunan Misi 3 Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.
Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:
- a) Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi dari sektor-sektor potensial pendukung perekonomian daerah.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah yaitu menguatkan sistem ekonomi melalui peningkatan kompetensi pelaku- pelaku usaha, penguatan jejaring permodalan, produksi, dan juga pemasaran, serta pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian, perdagangan, koperasi dan UKM, pariwisata, perikanan, dan sektor- sektor lainnya.
- b) Sasaran 2 : Meningkatnya daya tarik investasi.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah yaitu meningkatkan daya tarik berinvestasi melalui penyebarluasan potensi investasi, dan pemberian kemudahan berinvestasi.
- c) Sasaran 3 : Menurunnya angka pengangguran, PPKS dan meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat.
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

- (1) memperluas akses pekerjaan bagi penduduk usia produktif melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dengan cara meningkatkan skill dan kompetensi para pencari kerja, serta penyebarluasan informasi peluang kerja;
 - (2) meningkatkan penanganan PPKS melalui pemberdayaan dan pelibatan sumberdaya sosial yang ada, pemberdayaan PPKS potensial, serta pemberian bantuan sosial kepada PPKS tidak potensial;
 - 3) menguatkan fasilitasi kepada pelaku usaha koperasi dan usaha mikro meliputi pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemudahan perizinan usaha dan perusahaan promosi dagang dan dukungan kelembagaan;
 - (4) menguatkan daya saing kepemudaan melalui fasilitasi kegiatan pemuda yang dapat menumbuhkan, prestasi dan peran serta pemuda dan organisasi pemuda, mendorong partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan, pengembangan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan;
 - (5) menguatkan daya saing olahraga melalui peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat, pembinaan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis berjenjang dan berkelanjutan, meningkatkan pola kemitraan olahraga dan mengembangkan sistem penghargaan, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang bagi seluruh masyarakat termasuk disabilitas.
- d) Sasaran ke 4 : Menguatnya peran desa dalam mengembangkan potensi masyarakat.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu menguatkan keberdayaan desa dalam mengembangkan potensi perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan juga penguatan lembaga pemerintahan desa.

- 4) Strategi Pembangunan Misi 4 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah :

- a. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudi luhur;

Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah yaitu meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan, pengembangan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan.

- 2) Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan penguatan sistem kesehatan, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik, pengendalian penduduk serta akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR.

- 3) Sasaran 3 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu meningkatkan pengarusutamaan gender dalam bidang pembangunan daerah melalui pelembagaan pengarusutamaan gender, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang responsif gender, peningkatan kualitas keluarga kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan hak anak di semua klaster untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO, peningkatan kualitas perlindungan khusus anak serta peningkatan sinergitas dan kerjasama antara dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- b. Tujuan 2 : Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan pelestarian warisan budaya melalui peningkatan kepedulian masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap warisan budaya, melakukan inventarisasi, termasuk pembaruan dokumentasi terhadap koleksi cagar budaya, peningkatan mutu tata kelola dan perlindungan cagar budaya serta pengelolaan potensi budaya daerah.

- 5) Strategi Pembangunan Misi 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap bencana.

Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- a) Sasaran 1 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur, pemanfaatan ruang, dan keterhubungan antar wilayah.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan keterhubungan antar wilayah melalui optimalisasi pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air dan pengendalian daya rusak air serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA, peningkatan jalan dan jembatan untuk mencapai kondisi mantap sebagai sarana aksesibilitas masyarakat serta pengelolaan sistem drainase, pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat, pemenuhan terhadap akses air limbah domestik, peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan serta bangunan gedung, penyusunan rancangan rinci tata ruang, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kualitas Rumah Layak Huni (RLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan fasilitasi prasarana sarana dan utilitas, serta peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keterhubungan antar wilayah.

- b) Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan sampah dan indeks kualitas lingkungan hidup.

- c) Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang ada.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana, Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana, Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi

dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana, mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020/ 2021	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
						2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kapasitas Fiskal dan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Opini BPK		opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Rasio PAD terhadap APBD	jumlah PAD dibagi jumlah APBD x 100 %	%	16,27	20,59	20,13	20,45	20,79	21,24
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah	Waktu penyusunan Raperda APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah dibagi target waktu dikali 100	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	Nilai Pertumbuhan PAD per tahun	%	5	5	5	5	5	5
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Badan	Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip			76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	80 (BB)

C. Program dan Kegiatan

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan.
2. Jumlah usulan dana/pagu indikatif untuk melaksanakan program/kegiatan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 total sebesar Rp. 453.482.912.951,00.

Kebijakan operasional dalam menunjang terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Pekalongan, dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 - 5) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
 - 1) Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
 - 2) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

- 4) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas.
 - 5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- 1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
 - 2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 3) Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 - 4) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
 - 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
 - 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- e. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- 1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 1) Penyusunan Standar Harga.
 - 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - 3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - 5) Inventarisasi Barang Milik Daerah.
 - 6) Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - 7) Penilaian Barang Milik Daerah.
 - 8) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 9) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- 10) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- 11) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- 12) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
- 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
- 4) Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah.
- 5) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
- 6) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 7) Penagihan Pajak Daerah.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Nama perangkat daerah : Badan Pengelolaan

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02		KEUANGAN											453,482,912,951	474,820,780,000		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											43,764,287,000	40,073,300,000		
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											10,000,000	50,000,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	20,000,000
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											17,294,287,000	14,320,000,000	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	81 Orang	100 Persen	16,994,287,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	14,000,000,000
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	320,000,000
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											5,000,000	30,000,000	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Orang	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	15,000,000
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											430,000,000	585,000,000	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	20,000,000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	120,000,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	70,000,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang disediakan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	120,000,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	60,000,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Laporan	100 Persen	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	175,000,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60,000,000						820,000,000	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 Persen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	80,000,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25,300,000,000						23,548,300,000	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	25,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	23,218,300,000
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	330,000,000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						665,000,000						720,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	55 Unit	100 Persen	295,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	320,000,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Unit	100 Persen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	270,000,000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 Persen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	130,000,000
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										402,264,401,093	427,024,780,000			
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										2,237,000,000	1,750,000,000		
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	250,000,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	200,000,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	737,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	550,000,000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 Persen	850,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	550,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	200,000,000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								718,000,000					830,000,000
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase pengelolaan Perbendaharaan yang terlaksana	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	160,000,000
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase pengelolaan Perbendaharaan yang terlaksana	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	150,000,000
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase pengelolaan Perbendaharaan yang terlaksana	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	188,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	220,000,000
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase pengelolaan Perbendaharaan yang terlaksana	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	80,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase pengelolaan Perbendaharaan yang terlaksana	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2000 Dokumen	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	220,000,000
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								1,290,000,000					1,500,000,000
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	225,000,000
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Laporan	100 Persen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	275,000,000
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	550,000,000
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah OPD yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	45 OPD 0 Orang	100 Persen	240,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	300,000,000
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								397,684,401,093					422,574,780,000
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah desa yang menerima dana desa dan Alokasi Dana Desa	Prosentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	272 Desa	100 Persen	378,850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	404,194,780,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target	Target					
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tahun tersalurkannanya dana untuk keperluan mendesak dan tidak diprediksi	Prosentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	6,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	6,500,000,000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak dan retribusi	Prosentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	272 Desa	100 Persen	12,834,401,093	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	11,880,000,000
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				335,000,000									370,000,000
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang Terpelihara	Terwujudnya Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Keuangan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Aplikasi	100 Persen	335,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	370,000,000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				3,475,000,000									4,585,000,000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				3,475,000,000									4,585,000,000
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	100 Persen	250,000,000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Aplikasi 1 Dokumen	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	100 Persen	275,000,000
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	100 Persen	110,000,000
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	100 Persen	165,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	100 Persen	60,000,000
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	Dokumen Asuransi Gedung Kantor, Gedung Pasar, Kendaraan Dinas Gedung Bangunan Terpelihara Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah Terpasang Sertifikat Tanah	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen 4 Unit 0 Laporan 100 Buah 200 Sertifikat	100 Persen	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	100 Persen	2,700,000,000
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan 2 Laporan	100 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	100 Persen	110,000,000
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	100 Persen	200,000,000
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	100 Persen	330,000,000
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	45 Laporan	100 Persen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	100 Persen	55,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	100 Persen	160,000,000
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	Jumlah OPD yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	47 OPD 0 Orang	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	100 Persen	170,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						3,979,224,858				3,137,700,000			
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3,979,224,858				3,137,700,000			
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pertumbuhan PAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan PAD tiap tahunnya	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	91,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan PAD	100 Persen	117,700,000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pertumbuhan PAD	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan PAD tiap tahunnya	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	285 Desa/Kelurahan	100 Persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan PAD	100 Persen	210,000,000
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pertumbuhan PAD	Jumlah bulan terpenuhinya tenaga administrasi dan penunjang pelayanan PBB	Peningkatan PAD tiap tahunnya	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	550,021,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan PAD	100 Persen	470,000,000
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pertumbuhan PAD	Jumlah Kartu Obyek Pajak Daerah	Peningkatan PAD tiap tahunnya	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	22175 Objek Pajak	100 Persen	882,076,958	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan PAD	100 Persen	450,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 merupakan dokumen satu tahunan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program - program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) ini mengacu pada pemetaan nomenklatur yang telah disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Permendagri ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan diimplementasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta untuk pemenuhan Standar Pelayanan Mminimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM).

Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keuangan	Pagu Indikatif	Sumber Dana
5					Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan		
5	02				Keuangan	453,482,912,951	
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.764.287.000	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,294,287,000	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,994,287,000	PAD, DTU-DAU
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	300,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	430,000,000	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	45,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,000,000	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,300,000,000	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,000,000,000	PAD, DTU-DAU
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665,000,000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	295,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120,000,000	DTU-DAU
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	402,264,401,093	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2,237,000,000	DTU-DAU

PEEMRINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	250,000,000	DTU-DAU
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	200,000,000	DTU-DAU
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	737,000,000	DTU-DAU
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	850,000,000	DTU-DAU
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	200,000,000	DTU-DAU
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	718,000,000	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	145,000,000	DTU-DAU
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	125,000,000	DTU-DAU
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	188,000,000	DTU-DAU
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	60,000,000	DTU-DAU
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	200,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1,290,000,000	
5	02	01	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	200,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	250,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	600,000,000	DTU-DAU
5	02	01	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	240,000,000	DTU-DAU

PEEMRINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

					Kabupaten/Kota		
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	397,684,401,093	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	378,850,000,000	PAD, DTU-DAU
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6,000,000,000	DTU-DAU
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12,834,401,093	PAD
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	335,000,000	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	335,000,000	DTU-DAU
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3,475,000,000	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,475,000,000	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	175,000,000	DTU-DAU
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	200,000,000	
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,000,000	DTU-DAU
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	175,000,000	DTU-DAU
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	225,000,000	DTU-DAU
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2,000,000,000	DTU-DAU
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	100,000,000	PAD, DTU-DAU
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	200,000,000	PAD, DTU-DAU
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150,000,000	PAD, DTU-DAU
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	40,000,000	DTU-DAU
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	60,000,000	DTU-DAU
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50,000,000	DTU-DAU
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,979,224,858	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,979,224,858	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	91,000,000	PAD, DTU-DAU
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	200,000,000	PAD, DTU-DAU
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	550,021,500	PAD, DTU-DAU
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	882,076,958	PAD, DTU-DAU

PEEMRINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	500,000,400	PAD, DTU-DAU
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	432,706,000	PAD, DTU-DAU
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1,323,420,000	PAD, DTU-DAU

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman kepada RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023. Substansi Renja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah, yaitu memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan lokasi kegiatan dalam pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 disusun terukur dengan berpedoman pada arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Rencana Kerja (Renja), maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan unsur teknis pelaksana kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran;

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, selain dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai juga diperlukan kompetensi, semangat, tekad dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan juga memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Kajen, 25 Juli 2022

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



CASMIDI, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19650407 199203 1 010